

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

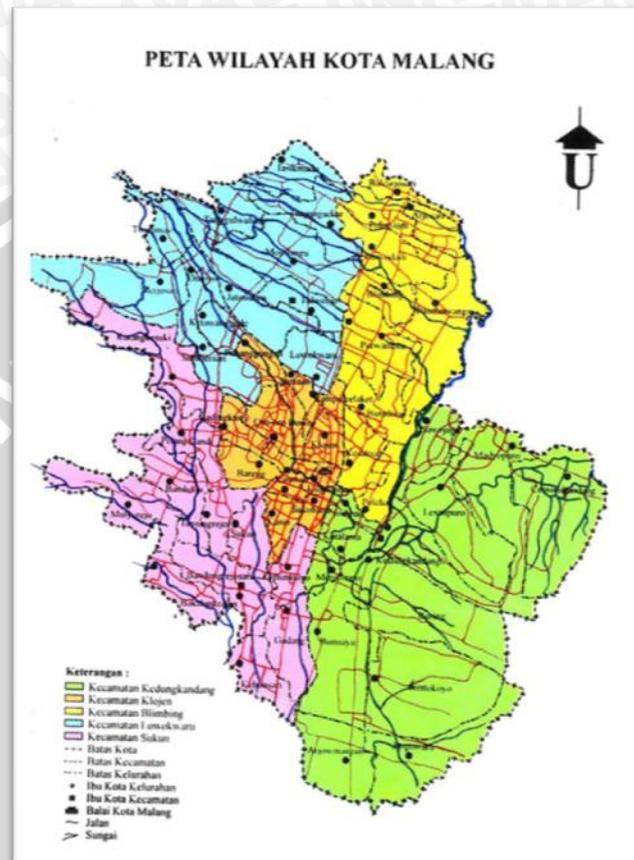
###### a. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang terletak secara astronomis pada posisi  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan Luas wilayah Kota Malang seluas  $110,06 \text{ km}^2$  yang terletak berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Secara Umum Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang diseluruh sudutnya, dengan rincian batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Gambar 1.

Peta Wilayah Kota Malang



Sumber: Malang Dalam Angka 2011 disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2011

Kota Malang memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Klojen. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang merupakan kota yang menjadi salah satu kota yang banyak diminati sebagai tujuan pendidikan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya ribuan pelajar dan mahasiswa yang membanjiri Kota Malang untuk menimba ilmu pengetahuan dari segala jenjang pendidikan.

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikannya senantiasa melakukan pembangunan disektor pendidikan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) dimana didalamnya termuat visi Kota Malang, yaitu:

**“Terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya, menuju masyarakat yang maju dan mandiri”**

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Malang tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam misi Kota Malang tahun 2009-2013. Misi Kota Malang 2009-2013 tersebut yaitu:

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas;
2. Mewujudkan Peningkatan kesehatan Masyarakat;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pusat yang Ramah Lingkungan;
4. Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya;
5. Mewujudkan dan mengembangkan Pariwisata yang berbudaya;
6. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam mewujudkan visi misi Kota Malang dibidang pendidikan adalah dengan meningkatkan fasilitas yang baik guna meningkatkan aktifitas pendidikan. Saat ini Kota Malang memiliki banyak instansi pendidikan baik sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang formal maupun non formal. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat

pemondokan, toko buku, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya.

## 2. Gambaran Umum Situs Penelitian

### a. Sejarah Singkat SDN Percobaan 1 Kota Malang

Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang dahulu adalah sekolah yang dikelola oleh IKIP Malang, bernama SD Laboratorium IKIP Malang yang didirikan oleh Prof. Dr. Supartinah Pakasi, pada tahun 1968. Tahun 1973 berubah nama menjadi Proyek Perintis sekolah Pembangunan (PPSP) dalam binaan IKIP Malang. Kemudian turun SK Mendikbud No.027/V/1986, yaitu tentang pengelolaan sekolah yang melaksanakan printisan pendidikan dialihkan pengelolaanya kepada Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Kemudian turun SK mendikbud No.0707/P/1986, tentang penegerian sekolah dasar proyek Perintisan Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Malang, menjadi Sekolah Dasar Negeri Malang dalam binaan Kanwil Depdikbud Prop. Jatim. Tahun 1987, turun SK Mendikbud No.0757/O/1987, tentang penegrian 4 (empat) Sekolah Dasar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan keputusan Mendikbud No.0326/0/1978 dan No.070/P/1986, SD Negeri Malang menjadi SD Negeri Percobaan Malang dalam binaan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dengan berlakunya OTODA, SDN Percobaan dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Malang. Keputusan Walikota Malang No. 138 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004, tentang penetapan perubahan kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Percobaan menjadi Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota

Malang. Dan mulai tahun 2013 Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang dijabat oleh Dra. Anita Roesmaria, M.Pd.

#### **b. Keadaan dan Kondisi Obyektif SDN Percobaan 1 Kota Malang**

SDN Percobaan 1 Kota Malang beralamatkan di Jl. Magelang No. 04 Kelurahan Summersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan luas lahan 4.213 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.799,5 m<sup>2</sup>. Sekolah ini memiliki 13 ruangan kelas dan beberapa ruangan yang digunakan sebagai saran-prasarana penunjang pendidikan. Dengan jumlah siswa kelas I – VI yang mencapai 501 siswa pada tahun pelajaran 2013/2014, dengan jumlah rombongan belajar berjumlah 13 rombongan dengan rincian sebagai berikut: Kelas I : 2rombel, kelas II : 2rombel, kelas III : 2rombel, kelas IV : 2rombel, kelas V : 2rombel, dan kelas VI : 3rombel.

SDN Percobaan 1 Kota Malang adalah salah satu sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran KTSP. Dengan jam pembelajaran dimulai pada pukul 06.30 dengan diawali dengan kultum dan doa bersama kecuali hari jumat ditambah senam bersama guru dan siswa, dengan adanya tambahan pelajaran untuk kelas 4 s/d 6. Kegiatan Pengembangan Diri berupa ragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa yang tersedia yakni: Pramuka, Kulintang, Karawitan, Bina Vokalis, Mengaji, Drum Band, Karate, Renang, dan Band.

#### **c. Motto, Visi, dan Misi SDN Percobaan 1 Kota Malang**

SDN Percobaan 1 Kota Malang memiliki motto “Unggul dalam Berfikir, Anggun dalam Berbudi Pekerti”. Sejalan dengan motto sekolah tersebut, dalam hal ini sekolah memiliki visi yakni “Terbangunnya Generasi yang Berilmu dan

Berakhlak Mulia”. Sedangkan misi SDN Percobaan 1 Kota Malang yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan IMTAQ untuk menguasai IPTEKS
2. Mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dan sekolah berwawasan lingkungan
3. Meraih kejuaraan lomba mata pelajaran, seni, olahraga minimal tingkat kota tiap tahun
4. Mewujudkan sekolah ramah lingkungan sehingga dapat menjadi penggerak masyarakat sekitar
5. Mengembangkan potensi peserta didik dan pendidik sehingga menjadi sekolah unggul yang diminati.

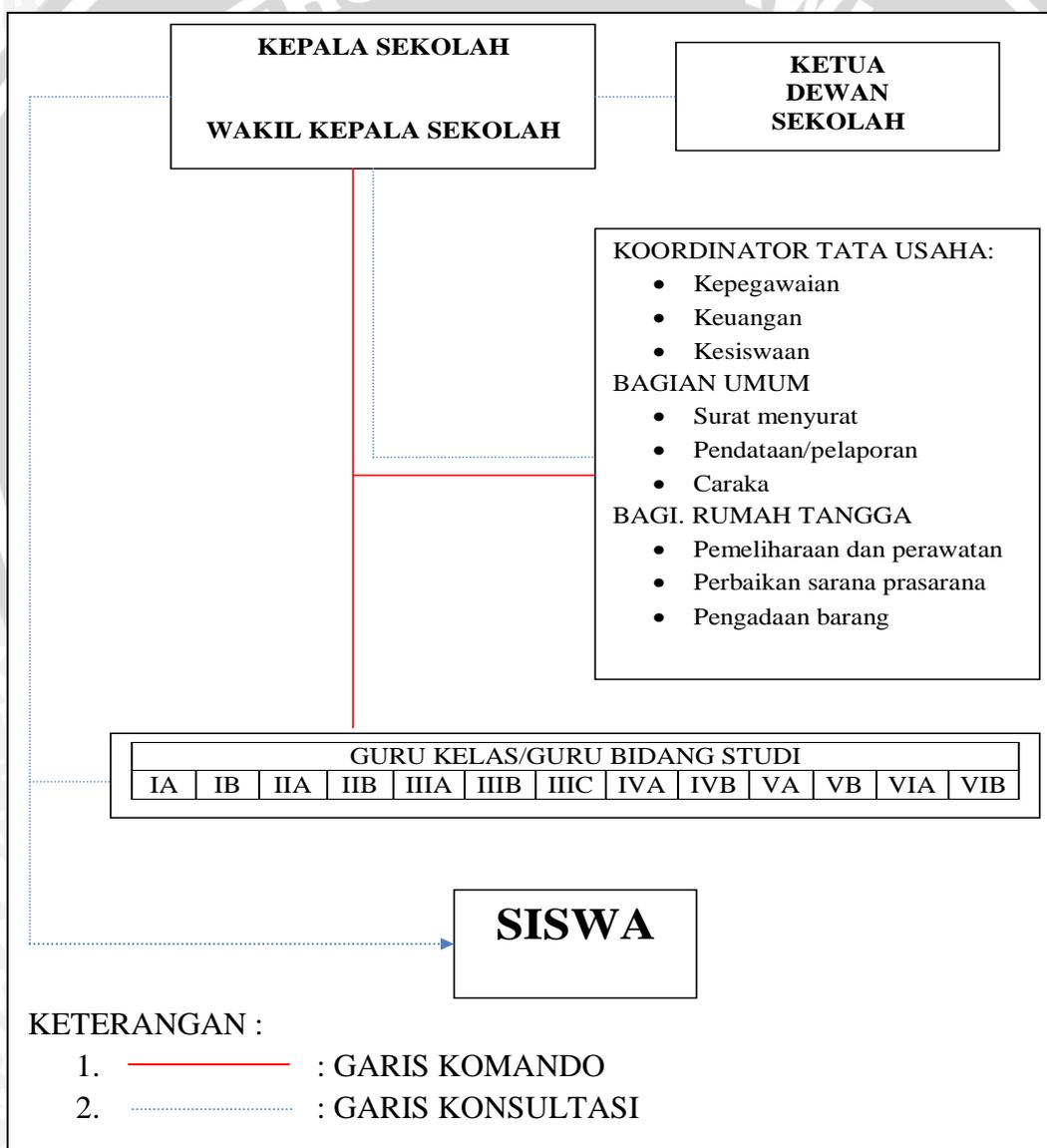
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh SDN Percobaan 1 Kota Malang adalah:

1. Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan pengembangan diri yang relevan dengan tingkat kelas
2. Meningkatkan nilai rata-rata kelas Ujian Akhir
3. Mengembangkan iklim pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berprinsip “Pendidikan Untuk Semua”
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, transparan, dan akuntabel.

**d. Struktur Organisasi**

Struktur dalam suatu organisasi sangat penting untuk dijadikan suatu dasar dalam mencapai tujuan dan hasil yang ditetapkan organisasi semaksimal mungkin. Struktur organisasi merupakan skema yang menggambarkan hubungan antara pimpinan dan bawahan serta antara bawahan dalam suatu bidang kerja organisasi.

Gambar 2.  
Struktur Organisasi SDN Percobaan 1 Kota Malang



Sumber: Dokumen Profil SDN Percobaan 1 Kota Malang

### **e. Perkembangan Lulusan**

Tingkat lulusan di SDN Percobaan 1 Kota Malang dapat dikatakan sangat baik, hal ini terbukti dengan 100% siswa lulus dengan nilai rata-rata yang cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Pelaksanaan dari Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang, dengan melihat dari:**

#### **a. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Sekolah Penerima**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah sebagai penyediaan pendanaan bagi penunjang program wajib belajar. Program ini merupakan bentuk bantuan pemerintah pusat dalam sektor pendidikan melalui pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak. Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Prosedur pelaksanaan BOS diawali dengan penetapan organisasi yang melaksanakan BOS, sesuai dengan Buku Panduan BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim manajemen Sekolah. Sedangkan susunan untuk tingkat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Sekolah sebagai berikut:

#### **Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota**

##### **1. Penanggung Jawab**

Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota

2. Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan)

- a. Manajer;
- b. Unit Pendataan SD/SDLB;
- c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP;
- d. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

3. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

- a. Mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah
- b. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mendatangi naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- c. Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir yang disediakan;
- d. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsialisasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
- f. menyediakan dana operasional sekolah program BOS di kab/kota dari sumber APBD;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- i. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
  - j. Mengumpulkan dana merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
  - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
  - b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
  - c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.
- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota. Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### **Tim Manajemen BOS Sekolah**

1. Penanggung Jawab  
Kepala Sekolah
2. Anggota

- a. Bendahara BOS sekolah;
  - b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
3. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah
- a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
  - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;
  - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
  - d. Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
  - e. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
  - f. Mengumumkan besar dan yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
  - g. Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman;
  - h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
  - i. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS;
  - j. Melakukan Pembukuan secara tertib;

- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - l. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
  - m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - n. Mendatangi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH (Naskah Perjanjian Hibah) BOS.
4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
- a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
  - b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi perimaan dan penggunaan dana BOS kepada oarangtua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orangtua siswa pada saat penerimaan raport;
  - c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
  - d. Dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

Struktur Organisasi tersebut adalah unsur minimum yang sudah ditentukan dalam Buku Petunjuk Teknis 2012 yang sudah ditentukan. Dalam hal ini apabila

suatu daerah merasa perlu adanya penambahan unsur dalam pelaksanaan Program BOS diperbolehkan melakukan penambahan, tetapi dengan konsultasi kepada Pemerintah Daerah setempat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Drs. Imam Khambali selaku Kasi Sarpras Pendidikan SD, PK LK yang juga bertugas dalam Tim selaku Pendataan BOS SD/SDLB:

“memang untuk instansi yang mengelola BOS di Kota Malang sesuai dengan juknis, kami tidak melakukan penambahan unsur pelaksana karena menurut kami sudah cukup lah dan dengan kendala keterbatasan dana, akan tetapi kami juga selalu berkoordinasi dengan bagian lain dalam menjalankan fungsi kami”. (Wawancara, Tanggal 19 Desember 2013, Pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Bapak Sariman selaku Staff bidang SD Kota Malang:

“untuk Kota Malang susunan Tim manajemn BOS sesuai dengan juknis dan tidak ada penambahan, akan tetapi disini saya yang tidak masuk dalam Tim juga membantu kelancaran, kan itu kalo hanya beberapa orang itu dirasakan sangat berat lah mas, jadi saya juga membantu”. (Wawancara, 19 Desember 2013, Pukul 10.00 WIB)

Sedangkan pada tingkat Tim Manajemen Sekolah juga dapat ditegaskan oleh Ibu Dra. Anita Rosemaria, M.Pd selaku kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“kalo dari kami tim pelaksana BOS tidak kami lakukan penambahan karena itu akan menjadi beban dari pendanaan, jadi selama ini dalam pelaksanaan kami juga dibantu oleh para staf guru disekolah ini saja”. (Wawancara, Tanggal 26 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mulai dari Tim Manajemen BOS Kota Malang tidak melakukan penambahan unsur terhadap

pelaksanaan program BOS dan dari Tim Manajemen BOS sekolah juga tidak melakukan penambahan unsur karena adanya keterbatasan dana.

Sedangkan untuk proses penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

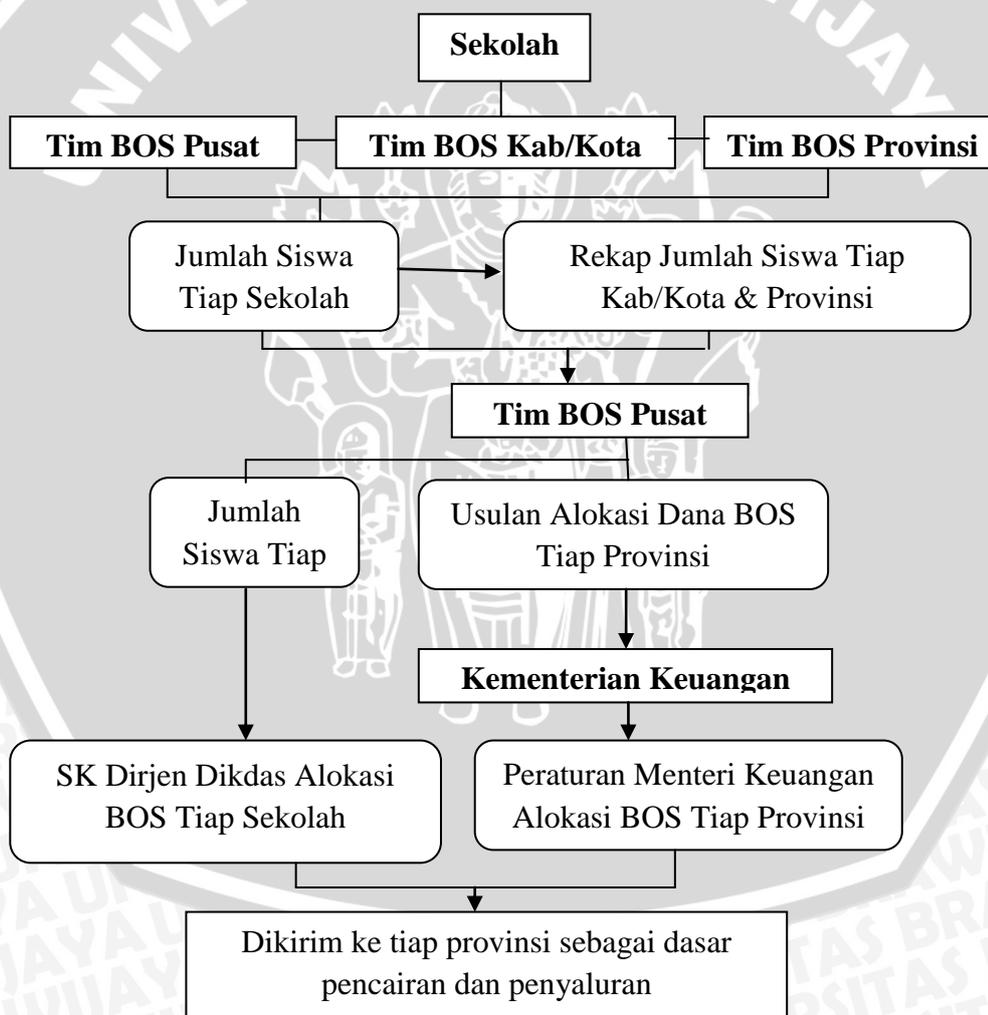
1. Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
4. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
5. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
7. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);

8. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran sebelumnya, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data tahun pelajaran yang akan datang.

Gambar 3.

Mekanisme Pengalokasian Dana BOS



Sumber: Buku Panduan Dana BOS

Alokasi dana BOS tiap sekolah dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun ajaran yang berbeda. Untuk alokasi dana BOS periode Januari – Juli didasarkan pada jumlah siswa ditahun sebelumnya, sedangkan alokasi dana BOS periode Juli – Desember didasarkan pada data jumlah siswa tahun ajaran yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Imam Khambali selaku Kasi Sarpras Pendidikan SD, PK LK yang juga bertugas dalam Tim selaku Pendataan BOS SD/SDLB:

“Dalam pengalokasiaanya terdapat dua periode, jadi sekolah harus segera melaporkan data jumlah siswa setelah PSB (Penerimaan Siswa Baru) kesini. Setelah itu kami lanjutkannya ke Propinsi untuk diaudit”. (Wawancara, Tanggal 19 Desember 2013, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah PSB (Penerimaan Siswa Baru) setiap sekolah harus mendata jumlah siswa yang terdaftar disekolah untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk kemudian oleh dinas diteruskan pada Tim Manajemen BOS propinsi. Jumlah siswa tersebut akan dijadikan dasar acuan sebagai besarnya alokasi dana yang diterima oleh sekolah.

Proses penyaluran dilaksanakan oleh Tim manajemen Propinsi melalui Bank Pemerintah/Pos. Di Kota Malang sendiri penyaluran melalui Bank Jatim, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Imam Khambali selaku Kasi Sarpras Pendidikan SD, PK LK yang juga bertugas dalam Tim selaku Pendataan BOS SD/SDLB:

“sudah mulai awal pelaksanaan program BOS ini penyalurannya melalui Bank Jatim. Setelah itu kami perlu menginformasikan kepada sekolah agar yang belum memiliki rekening di Bank Jatim agar membukanya”. (Wawancara, Tanggal 19 Desember 2013, Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Tim Manajemen BOS propinsi telah menunjuk Bank Jatim sebagai tempat penyaluran dana BOS. Didalam Buku Teknis juga dijelaskan bahwa setiap sekolah harus memiliki nomer rekening sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki. Dalam hal ini seluruh sekolah di Kota Malang harus memiliki rekening di Bank Jatim.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak sekolah yang dijelaskan oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“setelah mendapatkan informasi dari dinas pendidikan Kota Malang bahwa penyaluran dana lewat Bank Jatim, kami langsung membuka rekening atas nama sekolah. memang kami sudah mengataspasinya karena didalam Petunjuk Teknis Penggunaan sudah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah.” (Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pihak sekolah harus memiliki rekening di Bank Jatim sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana BOS. Pihak sekolah harus membuka rekening atas nama lembaga/sekolah agar dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **b. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang**

### **1) Perencanaan Penggunaan Dana BOS**

Seperti yang dijelaskan dalam Buku Petunjuk Penggunaan Dana BOS, pertama-tama sekolah harus menjalankan semua prosedur yang sudah terlampir seperti mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap yang mana didalamnya berisikan data-data mengenai sekolah, nomer rekening sekolah, keadaan sekolah dan data siswa.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Anita Rosemaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“memang benar semua syarat-syarat yang dibutuhkan dalam persiapan penerimaan dana BOS sudah terlampir dalam Buku Petunjuk Penggunaan dana dan semua formulir juga tersedia, jadi kami cuma tinggal mengisinya saja.” (Wawancara, Tanggal 26 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

Apabila syarat-syarat prosedural sudah terpenuhi maka sekolah selanjutnya tinggal membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) atau yang sekarang berubah menjadi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang sebagai berikut:

“dana BOS ini harus masuk dalam pos penerimaan dalam RKAS, jadi pihak sekolah harus membuat RKAS selama satu tahun kedepan yang diikuti oleh Kepala Sekolah, Bendahara (saya sendiri), Dewan Guru, dan Komite Sekolah. RKAS ini disetorkan setiap awal tahun ajaran. Akan tetapi apabila ada perubahan maka pihak sekolah akan mengirimkan perbaikan RKAS lagi.” (Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) ini bertujuan untuk menunjukkan rincian kegiatan dan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan dan yang akan dibiayai oleh dana BOS. Dan apabila ada perubahan dibulan-bulan kedepan dalam satu periode maka pihak sekolah melakukan revisi terhadap RKAS dan mengirimkan lagi. Dalam pembuatannya Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru dan Komite Sekolah berperan penting dalam proses pembuatannya.

Seperti yang diungkapkan Ibu Dra. Anita Roesmaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang juga memaparkan:

“Memang dalam penyusunan RKAS kami melibatkan setiap guru mata pelajaran agar dalam menyusun RKAS dapat menyesuaikan dengan

kebutuhan setiap mata pelajaran dan program sekolah untuk selanjutnya kami mengkoordinasi dengan Ketua Komite dan Bendahara untuk didiskusikan bersama.” (Wawancara, Tanggal 26 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Windari, S.Pd selaku Guru

Kelas IIIA SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“memang benar, dalam menyusun RKAS guru juga selalu dilibatkan. Hal ini ditujukan agar mendapatkan masukan-masukan mengenai kebutuhan apasaja yang diperlukan oleh sekolah dilihat dari sisi guru.”(Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 11.00 WIB)

Senada dengan pernyataan diatas Ibu Dra. Dwi Lestari selaku Ketua Komite Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang juga memberikan pernyataan:

“saya sebagai Ketua Komite Sekolah biasanya juga ikut memberikan masukan-masukan mengenai penyusunan RKAS, dan kami juga sangat hati-hati dalam pembuatan RKAS ini karena ini mengenai apasaja yang akan dan boleh didanai oleh dana BOS.”(Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 10.00 WIB)

Melihat wawancara diatas Kepala Sekolah adalah ketua dalam pembuatannya dengan dibantu Dewan Guru dan Komite Sekolah yang bertugas membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat Program sekolah sedangkan Bendahara meliputi kegiatan yang bersifat pengembangan sarana prasarana akan tetapi semua tidak hanya menfokuskan diri dengan tugas-tugasnya saja, tetapi juga saling memberikan masukan-masukan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pada akhirnya RKAS ini harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite.

Gambar 4.

Rincian Kegiatan Dan Anggaran Sekolah

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)**  
TAHUN PELAJARAN : 2013/2014

Sekolah : SDN PERCOBAAN 1		<b>FORMAT BOS K-1</b>	
Kecamatan : MALANG		Diisi oleh Sekolah	
Provinsi : JAWA TIMUR		Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota	

PENERIMAAN				PENGELUARAN/BELANJA			
No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah	No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SISA TAHUN LALU	0	I	1	PROGRAM SEKOLAH	
					1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	24.187.500
II	2	PENDAPATAN RUTIN			1.2	Pengembangan Standar Isi	750.000
	2.1	Gaji PNS	586.581.600		1.3	Pengembangan Standar Proses	117.972.000
	2.2	Gaji Pegawai Tidak Tetap			1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.500.000
	2.3	Belanja Sarang dan Jasa			1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	41.250.000
	2.4	Belanja Pemeliharaan			1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	13.400.000
	2.5	Belanja Lain-Lain			1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	32.790.000
					1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	45.617.500
III	3	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)		II	2	BELANJA LAINNYA	
	3.1	BOS Pusat	291.740.000		2.1	Belanja Pegawai	
	3.2	BOS Propinsi				- PNS	586.581.600
	3.3	BOS Kab/Kota				- GTT / PTT	85.680.000
		BOSDA	135.810.000		2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	22.703.000
		Pengentasan Wajib Belajar 9 Tahun	30.180.000	II	2.3	Belanja Modal	69.890.000
IV	4	BANTUAN					
	4.1	Dana Dekonsentrasi					
	4.2	Dana Tugas Pembantuan					
	4.3	Dana Alokasi Khusus					
	4.4	Lain-Lain (bantuan luar negeri/hibah)					
V	5	SUMBER PENDAPATAN LAINNYA					
	5.1	Dana sukarela					
	5.2	Jumlahangan sukarela kelas 1					
	5.3	Utaha Lain					
<b>Jumlah Penerimaan</b>			<b>1.044.311.600</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>			<b>1.044.311.600</b>

Mengetahui, Menyetujui, Malang, 10 Juli 2013  
 Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

Dra. DWI LESTARI Dra. ANITA ROSEMARIA, M.Pd SUMIYARTI  
 NIP. 19670512 199403 2 009 NIP. 19650819 198803 2 004

Sumber: Dokumen Keuangan SDN Percobaan 1 Kota Malang

Melihat gambar diatas merupakan salah satu format form yang terlampir dalam Buku Panduan yang berisikan penerimaan dan pengeluaran/belanja yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 tahun ajaran. Dan seterusnya akan disetujui oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas,



Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

## 2) Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Proses pencairan dan BOS dilaksanakan dalam 3 bulan sekali tiap tahun. Dengan periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Dana BOS dikirim langsung ke rekening sekolah melalui Bank Jatim. Sedangkan proses pengambilannya harus sesuai dengan peraturan/ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau Bendahara BOS sekolah) dengan sepengetahuan oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis digunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Sekolah (RKAS).

Melihat poin-poin diatas dan melihat dilapangan dalam proses pengambilan dana BOS disekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang dilakukan oleh

Bendahara Sekolah. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“..kan dalam Buku Petunjuk sudah dijelaskan mengenai waktu pencairan jadi saat mendengar dana sudah disalurkan kerekening sekolah, saya ambil langsung ke Bank Jatim dengan membawa KTP Asli saya dan Stemple Sekolah, dengan sepengetahuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Dan dalam pengambilannya saya tidak langsung mengambil semua dana BOS untuk 3 bulan sekalian, akan tetapi selalu saya ambil setiap 1 bulan sekali dengan melihat kebutuhannya.” (Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

Ditambahkan oleh Ibu Dra. Dwi Lestari selaku Ketua Komite Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang mengatakan:

“memang saat pengambilan harus meminta ijin kepada saya(Ketua Komite Sekolah) atau setidaknya sepengetahuan saya, akan tetapi apabila saya sedang tidak ada biasanya ibu Sumiyarti(Bendahara Sekolah) memberikan laporan setelah melakukan pencairan(sesuai kesepakatan sebelumnya), tapi selama ini saya selalu ada karena dalam pencairan sudah biasa diawal bulan dan rutin.” (Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengambilan dana BOS dilakukan sendiri oleh Bendahara Sekolah dengan membawa KTP Asli dan stemple sekolah dengan sepengetahuan Kepala Sekolah dan Ketua Komite. Sementara dalam pencairannya, sekolah memiliki beberapa solusi agar tidak terjadi pemborosan yaitu dengan mengambilnya setiap bulan saja karena dengan begitu dapat menggunakan dana tersebut dengan seefisien mungkin.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Dra. Anita Rosemaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah:

“Ibu Sumiyarti(Bendahara Sekolah) sendirilah yang melakukan pengambilan dana BOS diBank Jatim, dan saat pengambilan beliau harus membawa beberapa persyaratan. Dan juga saat melakukan transaksi beliau harus meminta ijin kepada saya terlebih dahulu atau dengan kata lain saya

harus mengetahuinya. Disekolah ini dana BOS yang turun setiap 3 bulan sekaligus kerekening sekolah tidak langsung kami cairkan, akan tetapi kami mencairkannya setiap bulan dan untuk memenuhi dibulan tersebut. hal ini kami maksudkan agar sekolah ini dapat seefesien mungkin menggunakan dana tersebut.” (Wawancara, Tanggal 26 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB)

### 3) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam Buku Petunjuk Penggunaan dana BOS ditegaskan bahwa tidak semua komponen yang boleh dibiayai oleh dana tersebut. Hal ini didukung dengan penjelasan dari Bapak Drs. Imam Khambali selaku Kasi Sarpras Pendidikan SD, PK LK yang juga bertugas dalam Tim selaku Pendataan BOS SD/SDLB:

“memang setiap sekolah harus mengikuti petunjuk buku panduan BOS tak terkecuali mengenai apa-apa saja yang boleh dibiayai dan dibelanjakan dengan menggunakan dana BOS ini. Ada 13 komponen yang boleh didanai oleh dana BOS tersebut”. (Wawancara, Tanggal 19 Desember 2013, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa sekolah harus mengikuti semua petunjuk yang ada dalam buku panduan BOS. Menurut Buku Petunjuk Penggunaan BOS pembiayaan yang boleh didanai oleh dana BOS harus berdasarkan pada komponen-komponen yang sudah diatur sebagai berikut:

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran: Mengganti yang rusak, Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: Biaya pendaftaran, Pengadaan formulir, Administrasi pendaftaran, dan Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa: PAKEM(SD), Pembelajaran Kontekstual (SMP), Pengembangan pendidikan

karakter, Pembelajaran remedial, Pembelajaran pengayaan, Pementapan persiapan ujian, ekstrakurikuler (olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja), Usaha Kesehatan sekolah

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian: Ulangan harian, Ulangan umum, dan Ujian sekolah
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku investaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, minuman dan makanan ringan kebutuhan sekolah sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor
6. Langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, internet (*fixed/mobile modem*) baik dengan cara berlangganan maupun Prabayar, pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru, membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
7. Perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer: guru honorer (hanya memenuhi SPM), pegawai administrasi

(termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan

9. Pengembangan profesi guru: KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
10. Membantu siswa miskin: pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll), membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota disekolah tersebut
11. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK termasuk tinta priter, CD, dan flashdisk), pengadaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/PT Pos
12. Pembelian perangkat komputer: desktop/work station, Printer atau printer plus scanner
13. Biaya lainnya jika komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi dari BOS: alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, dan peralatan UKS.

Jadi dalam penggunaan dana BOS tidak semua boleh dibiayai menggunakan dana BOS. Hal ini didukung oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“Tidak semua boleh dibiayai oleh dana BOS yang boleh dibiayai adalah hal-hal yang menyangkut operasional sekolah saja, dan ada 1-13komponen

yang diterangkan dibuku petunjuk yang boleh dibiayai oleh dana tersebut.” (Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2013, Pukul 09.00WIB).

Pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa dana BOS murni hanya diperuntukkan untuk pembiayaan yang bersifat operasional saja. Penggunaan dana BOS disekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang dapat dilihat secara rinci dengan melihat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai berikut:

Tabel 01

## Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

0	Rencana pengeluaran	Jumlah
	<b>Program Sekolah</b>	
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	24.187.500
2	Pengembangan Standar Isi	750.000
3	Pengembangan Standar Proses	117.972.000
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	41.250.000
5	Pengembangan Standar Pengelolaan	13.400.000
6	Pengembangan Standar Pembiayaan	32.780.000
7	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	45.617.500

Sumber: data diolah dari RKAS SDN Percobaan 1

Melihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa SDN Percobaan 1 mengalokasikan sebagian besar dana untuk Pengembangan Standar Proses sebesar Rp. 117.972.000, alokasi ini dapat dikatakan pengeluaran yang terbesar dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Program Kesiswaan dan Program Ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian dari Pengembangan Standar Proses

yang ada di Sekolah ini, mengingat di sekolah ini memiliki beberapa Program Ekstrakurikuler yang cukup banyak seperti: Ekstrakurikuler Keperamukaan, Karate, Renang, kulintang, Binavokalis, Menari, Drum band, Melukis, mengaji, dan Olimpiade Mipa.

Adapun rincian penggunaan keseluruhan dana BOS di SDN Percobaan 1 Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Lulusan
  - a. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
  - b. Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN tk. Kecamatan
  - c. Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN tk. Kota
  - d. Pelaksanaan Ujian Praktek
2. Pengembangan Standar Isi
  - a. Penyusunan Program Tahunan
  - b. Penyusunan Program semester
  - c. Penyusunan Silabus
3. Pengembangan Standar Proses
  - a. Program Kesiswaan
  - b. Program ekstrakurikuler
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana
  - a. Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
  - b. Pengadaan dan Perawatan Meubeler
  - c. Pemeliharaan dan Perawatan Lingkungan
5. Pengembangan Standar Pengelolaan

- a. Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
- b. Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6. Pengembangan Standar Pembiayaan
7. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
  - a. Penyusunan Soal
  - b. Pelaksanaan Penilaian
  - c. Inovasi Model Penilaian

Mengacu keseluruhan penggunaan dana BOS di SDN Percobaan Kota Malang menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan petunjuknya yang mengacu kepada 13 komponen yang boleh dibiayai oleh dana tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Dra. Anita Roesmaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang sebagai berikut:

“saya rasa dana BOS ini digunakan sebagaimana mestinya, kami dari pihak sekolah selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak di sekolah ini, sehingga mereka dapat menikmati berbagai program-program dari sekolah sehingga para siswa dapat mengembangkan potensi dan bakatnya”. (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

### **c. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)**

Pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOS disusun oleh Bendahara sekolah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan persetujuan dari Kepala Sekolah dan Ketua Komite yang kemudian diberikan kepada Tim Manajemen Kota Malang. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini dikirim setiap triwulanan dalam 1 tahun. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 sebagai berikut:

“Dalam bentuk pelaporan penggunaan dana BOS, kami (pihak sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang) harus mencatat dengan rinci semua transaksi dan kuitansi-kuitansi ini harus tercatat dan tersimpan dengan rapi. Selain itu saya (Bendahara Sekolah) harus membuat SPJ rangkap 5 dengan rincian 3 rangkap dikirim ke UPT dan 2 rangkap disimpan oleh sekolah sebagai bukti apabila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti saat ada sidak. Dan setiap pelaporan itu harus memenuhi beberapa unsur yang sudah di tuangkan dalam buku panduan BOS.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban dana BOS harus memuat beberapa unsur-unsur menurut Buku Panduan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan BOS harus dilampiri dengan:
  - 1) Bukti kuitansi pembayaran
  - 2) Fotokopi Bukti surat Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah setempat
- c. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Pemantuan awal dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS pusat dengan melihat Surat Pertanggungjawaban yang dikirim oleh sekolah.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Bapak Sariman selaku Staff bidang SD Kota Malang:

“untuk pemantuan penggunaan dana BOS, selalu kami lakukan setiap triwulan dengan melihat SPJ yang dikirimkan oleh sekolah, dan selama ini semua masih berjalan lancar”. (Wawancara, 19 Desember 2013, Pukul 10.00 WIB)

Bentuk pertanggungjawaban juga tidak hanya sekedar mengirimkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tetapi juga dengan melakukan pelaporan kepada BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berkunjung/melakukan sidak kesekolah-sekolah.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Anita Roesmaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang sebagai berikut:

“Sekolah ini pernah akan dikunjungi oleh BPK yang akan melakukan sidak untuk melihat bagaimana penggunaan dana BOS disekolah ini, akan tetapi setelah ditunggu sekian lama pihak BPK tidak kunjung datang dan akhirnya hanya meminta data-data untuk dikirim. Selain BPK pernah ada juga dari pihak KPK yang mengunjungi sekolah ini. Dari pihak KPK memang melakukan kunjungan kesekolah-sekolah dengan waktu sidak yang tidak tentu.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

Selain melakukan pelaporan kepada BPK dan KPK, pihak sekolah juga melakukan pelaporan kepada walimurid setiap kenaikan kelas. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu walimurid Ibu Niken:

“saya rasa dana BOS memang sangat membantu terhadap saya, dan sekolah ini juga sangat transparan dalam penggunaannya. Hal ini terbukti dengan adanya pelaporan secara terperinci dan jelas mengenai penggunaannya, dengan mengumumkannya disetiap kenaikan kelas.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Ditambahkan pula oleh salah satu walimurid Ibu Welastuti mengatakan:

“iya, disekolah ini memang sangat transparan. Saya bahkan dapat memahami mengenai rincian penggunaan dana BOS disekolah ini dengan melihat bukti laporan kegunaan dan penjelasan yang diterangkan oleh bendahara sekolah ini setiap ada rapat pengambilan raport kelas.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dapat dijelaskan bahwa sekolah sangat bertanggungjawab penuh akan penggunaan dana BOS tersebut, hal

ini dapat dibuktikan dengan beberapa proses yang sekolah ini lakukan untuk mempertanggungjawabkannya. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota tetapi juga kepada masyarakat atau dalam hal ini selaku walimurid.

## **2. Evaluasi Dengan Melihat Output dan Outcome dari Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang**

Dalam upaya meningkatkan suatu mutu pendidikan memang faktor yang sangat dasar adalah masalah keuangan, dimana keuangan menjadi salah satu faktor utama. Peningkatan keuangan sekolah akan sangat mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan pula karena dengan peningkatan keuangan, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan pemberian sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Program dana BOS telah memberikan bantuan dalam mendukung terciptanya pendidikan yang bermutu sehingga diharapkan dapat memberikan output dan outcome yang positif di dunia pendidikan. Dilihat dari penelusuran peneliti di tingkat sekolah, program BOS sangat membantu dalam meringankan beban siswa.

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Drs. Anita Rosemaria, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“Memang dilihat dari manfaatnya dana BOS memang banyak sekali manfaatnya terutama dalam pembiayaan biaya operasional sekolah. pengalokasian dana BOS digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah jadi sekolah tidak perlu memungut biaya operasional kepada siswa”. (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

### a. Output dari Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Melihat dari begitu banyaknya manfaat dari pemberian dana BOS, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat hasil keluaran (output) dari pemberian dana BOS mulai tahun 2005 yang dirasakan oleh pihak sekolah dan masyarakat, antara lain:

#### 1) Meringankan Biaya Operasioanal Sekolah

Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“Dengan dana BOS sekolah tidak usah menarik biaya operasional kepada walimurid lagi, tapi yang dimaksud hanya biaya operasional saja yang gratis. Namanya juga dana BOS jadi hanya biaya operasional saja yang dibiayai tetapi untuk SPP masih ada, *kan* dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiaya SPP sekolah” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Pernyataan diatas juga didukung dengan pernyataan Ibu Eni selaku walimurid:

“Saya sangat merasa terbantu dengan dana BOS yang diberikan pemerintah, karena sangat membatu hal ini saya ketahui dari laporan yang diterangkan oleh pihak sekolah setiap kenaikan kelas.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Sekolah ini memang sangat baik dan transparan dalam penggunaan dana BOS, akan tetapi dana BOS diperuntukan hanya untuk biaya operasional sekolah sedangkan masalah SPP sekolah masih membebankan kepada walimurid, akan tetapi sekolah juga memiliki kebijakan dimana besaran SPP ditentukan oleh kemampuan Orangtua Siswa.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Sodikin selaku walimurid:

“masalah SPP disekolah ini saya tidak keberatan mas, karena besarnya ditentukan sesuai kemampuan saya(Orangtua) jadi saya merasa terbantu dengannya dan dengan dana BOS saya merasakan sekali manfaatnya.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Ditambahkan juga oleh Ibu Eni selaku walimurid:

“saya sih tidak terlalu keberatan kalo masih ada SPP, karena besarnya juga tidak terlalu mebebakan saya, biaya SPP putra saya sebesar Rp.25.000,- saja mas”. (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Dari beberapa wawancara menunjukkan memang sekolah masih menarik SPP akan tetapi besarnya ditentukan melihat kemampuan Orangtua, selain itu sosialisai mengenai penggunaan dana BOS yang diberikan sekolah kepada walimurid sangat baik dimana walimurid dapat merasakan dan mengerti akan kegunaan dan manfaat dana BOS tersebut.

## **2) Pengembangan melalui Program Sekolah**

Dalam upaya meningkatkan mutu, sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang telah memiliki beberapa program sekolah, antara lain:

1. Pengembangan Kompetensi Lulusan dalam hal ini pihak sekolah memaksimalkan pengembangan kompetensi lulusan melalui penyusunan kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan uji coba UASBN/UN tk. Kecamatan/Kota, dan pelaksanaan ujian praktek.
2. Pengembangan Standar Proses terdiri dari Program Kesiswaan dan Program Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga sangat mendukung terciptanya lulusan yang bermutu karena kegiatan ini dapat menciptakan dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang selain pendidikan formal.

Dari pemaparan diatas mengenai manfaat dana BOS yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anita Rosemaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“dikarenakan akan keterbatasan dana dan beberapa aturan-aturan dalam penggunaan Dana BOS, maka di SDN Percobaan 1 Malang ini kami mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan dari dana BOS ini lewat beberapa program yang sekolah buat, dalam program ini yang secara langsung dapat dirasakan oleh siswa adalah program standar proses yang merupakan salahsatu *point* dalam program sekolah ini. Program standar isi berisikan program ekstrakurikuler seperti keperamukaan, karate, renang, menari, drumband, melukis, mengaji, dan olimpiade Mipa. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut berperan penting untuk menyalurkan hobi dan bakat anak-anak tanpa dipungut biaya.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

Hal tersebut juga didukung dari pernyataan dari beberapa walimurid di SDN Percobaan 1 Kota Malang mengenai output dari dana BOS melalui Program Sekolah:

“disekolah ini banyak sekali kegiatan yang bisa dipilih *mas*, dan kegiatan tersebut gratis, anak saya memilih karate sebagai ekstrakurikulernya.” (Wawancara dengan Ibu Niken, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

“Sama dengan putra Ibu Niken, anak saya juga memilih ekstrakurikuler karate, dan saya juga tidak perlu membayar biaya untuk ekstrakurikuler anak saya itu”. (Wawancara dengan Ibu Febrina, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.15 WIB)

“Saya sangat merasa senang mensekolahkan anak saya di sekolah ini, karena ada ekstrakurikuler mengaji dan menjadi pilihan anak saya. Saat diberi formulir mengenai pilihan ekstrakurikuler saya pikir ada biaya tambahan ternyata semua gratis, mungkin ini dari dana BOS ya *mas*”. (Wawancara dengan Bapak Sodikin, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.15 WIB)

### 3) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah

Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar yang baik, sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting harus dimiliki. Dengan sarana dan prasarana yang baik, secara tidak langsung dapat menimbulkan suasana yang kondusif dan sangat mendukung agar guru serta siswa merasa nyaman dalam memberi/menerima pelajaran dengan baik.

Hal ini senada dengan yang diutarakan Ibu Sumiyarti, selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“...melihat dari segi pembiayaan dari penerimaan dana BOS ini sangat banyak sekali manfaatnya, seperti biaya pembelian alat-alat penunjang pendidikan dan perbaikan sekolah. Akan tetapi dalam penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan untuk perbaikan/renofasi besar sekolah, jadi yang dimaksud adalah perbaikan dengan skala kecil saja.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Melihat dari RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dapat dijabarkan penggunaan dana BOS untuk membiayai pengembangan sarana dan prasarana sekolah meliputi: Pemeliharaan dan perbaikan gedung, Pengadaan dan perbaikan meubeler, dan Pemeliharaan dan perawatan lingkungan.

Manfaat yang dirasakan akan pemenuhan sarana dan prasarana juga dirasakan oleh Guru pengajar, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sophy Pamudya Herany, S.Pd selaku Guru kelas IA SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“saya merasa suasana kelas menjadi sangat nyaman, ketersediaan akan alat-alat pembantu mengajar terpenuhi. *Kan*, kalo semua terpenuhi mengajar pun menjadi nyaman dan lebih kondusif.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga ditegaskan oleh Bapak Anang Widodo Raharjo, S.Pd selaku Guru Olahraga SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“disekolah ini saya merasa ketersediaan peralatan penunjang kegiatan olahraga sudah lumayan lengkap sehingga saya bisa mengajar dengan lancar, serta yang penting siswa menjadi antusias dengan apa yang saja ajarkan karena peralatan yang lengkap.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Dengan terciptanya dan tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana secara tidak langsung dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan dari program dana BOS.

#### **b. Outcome dari Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dalam hal ini yang dimaksudkan outcome adalah timbal balik dari hasil yang dirasakan oleh pihak sekolah setelah menerima pendanaan dari dana bantuan operasional sekolah. outcome yang dimaksud adalah dengan melihat hasil lulusan dari sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang yang telah mengalami kelulusan 100%, dengan rincian Nilai Ujian Pengendali Mutu (UPM)/UASBN sebagai berikut:

Tabel 02.

Nilai Ujian Pengendali Mutu (UPM)/UASBN 5 Tahun Terakhir

Tahun	Terendah	Tertinggi	Rata-rata	Kelulusan
2004/2005	31,80	45,80	41,02	100%
2005/2006	34,00	46,40	41,93	100%
2006/2007	34,64	46,80	42,35	100%
2007/2008	21,75	28,85	26,47	100%
2008/2009	23,30	28,80	26,76	100%
2009/2010	22,05	28,45	25,59	100%

2010/2011	22,55	29,50	27,31	100%
-----------	-------	-------	-------	------

Sumber: Dokumen Profil SDN Percobaan 1 Kota Malang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari tahun ajaran 2004 sampai 2007 dimana nilai sempurna bagi siswa adalah 5,00 hal ini dikarenakan jumlah mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional berjumlah 5 mata pelajaran, sedangkan pada tahun ajaran 2007 sampai sekarang hanya mengujikan 3 mata pelajaran dengan nilai sempurna 3,00. Dengan nilai rata-rata yang baik juga berimbas kepada para lulusan yang diterima di SMP yang dapat dikatakan favorit dengan mutu baik, sehingga hal ini juga berdampak kepada minat masyarakat yang menginginkan putra-putrinya untuk disekolahkan di sekolah ini. Tabel diatas juga menunjukkan data lulusan pada tahun 2004 dimana program dana BOS baru diluncurkan pada tahun 2005, akan tetapi tingkat lulusan juga masih menunjukkan 100% dengan nilai yang baik.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang yang memaparkan:

“ kalo dilihat dari tujuan dana BOS yang menunjang peningkatan mutu pendidikan saya rasa masih kurang tepat *mas*, namun bila untuk membantu wajib belajar 9 tahun masih bisa dikatakan bisa.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemberian dana BOS sangat membantu terutama dalam pembiayaan operasional sekolah akan tetapi dikarenakan jumlah anggaran yang masih kurang dan adanya aturan-aturan dalam penggunaan dana, maka apabila dikatakan meningkatkan mutu pendidikan masih kurang tepat. Memang sekolah ini dikatakan sebagai sekolah favorit akan prestasi

yang diraih dari siswa, guru dan sekolah, namun faktor tingkat kemampuan orangtua siswa juga perlu diperhatikan karena sebagian besar orangtua siswa berasal dari kalangan menengah hingga kalangan mampu. Dengan tingkat kemampuan orangtua yang baik merupakan faktor penunjang akan peningkatan mutu siswa karena orangtua dengan tingkat kemampuan yang baik cenderung memperhatikan akan pendidikan anaknya, hal ini juga menunjukkan banyaknya siswa disekolah ini yang menerima pendidikan diluar sekolah seperti les privat dan lembaga bimbingan belajar.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1. Kerjasama Antara Staf Guru yang Saling Membantu**

Dalam proses berjalannya program ini terdapat beberapa faktor pendukung dari dalam sekolah yang dirasakan. Mulai dari pembuatan RKAS (Renacana Kegiatan dan Anaggran Sekolah) yang dibuat diawal sebelum pengalokasian dana BOS. Bentuk dukungan datang dari bantuan semua pihak disekolah ini dalam penyusunannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Anita Rosemaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“disini semua staf guru sangat membantu dalam penyusunan RKAS, mungkin karena hal ini menjadi tanggungjawab bersama demi sekolah jadi saya merasa terbantu dengan bantuan mereka.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

Selain pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) pihak sekolah juga wajib membuat pelaporan dalam bentuk SPJ dan menyimpan bukti-bukti transaksi ditempat yang disediakan oleh sekolah. dalam hal ini staf guru juga membantu dalam proses menarsip sebageian data dan kuitansi. Ini didukung oleh pernyataan Ibu Sumiyarti selaku Bendahara Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“memang dalam pembuatan SPJ harus saya sendiri yang membuat, tapi saya merasa tertolong dengan bantuan para guru-guru dalam penyusunan dan penyimpanan arsip seperti kuitansi.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

## **2. Keadaan Sekolah**

Keadaan sekolah yang cukup baik juga menjadi faktor pendukung dari penggunaan dana BOS ini dimana pihak sekolah tidak terlalu fokus dalam pemenuhan atau perbaikan sekolah. di SDN Percobaan 1 Malang juga sudah memiliki gedung pemanen yang sertai runagan-ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Dra Anita Rosemaria, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“untuk keadaan bangunan disekolah ini sudah cukup baik, jadi dana BOS tidak melulu digunakan untuk perbaikan bangunan sekolah, akan tetapi tidak serta merta tidak diperbaiki tapi juga dengan dana BOS juga sebagian dialokasikan untuk perbaikan ringan saja.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 11.00 WIB)

### **b. Faktor Penghambat**

#### **1. Sumber Daya Aparatur yang kurang**

Faktor penghambat juga dirasakan oleh sekolah selama proses berjalannya kebijakan dana BOS ini, salah satu Sumber Daya Aparatur yang dirasakan kurang

tentang memahami tentang administrasi keuangan maupun pengelolaan keuangan.

Dalam hal ini tugas pengelolaan dana BOS diserahkan kepada Bendahara sekolah sehingga tugas bendahara sekolah menjadi bertambah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyarti selaku Bendahara sekolah SDN Percobaan 1

Koata Malang:

“selain mengurus administrasi sekolah saya juga mendapat tugas mengurus dana BOS jadi tugas saya menjadi bertambah. Hal tersebut kadang yang membuat saya keteteran apalagi saat membuat laporan, jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu saya.” (Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

## **2. Peranserta Walimurid**

Menurut Buku Penggunaan Dana BOS menjelaskan bahwa masyarakat dalam hal ini orangtua siswa juga menjadi salah satu unsur yang wajib dipertimbangkan karena memiliki peranan sebagai pengawas dana tersebut. sementara tidak semua orangtua sadar akan hal ini sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Dwi Lestari selaku Ketua Komite Sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“kalau dikatakan peran masyarakat memang penting karena dapat digunakan sebagai masukan, akan tetapi saat pemberitahuan atau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS peran orangtua didalam rapat sangat minim karena jarang sekali ada masukan dari mereka.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu X salah satu walimurid SDN Percobaan 1 Kota Malang:

“mengenai dana BOS saya kurang begitu paham mas, jadi saya tidak begitu tertarik mengenai keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Bendahara. Tapi setidaknya saya tahu bahwa dengan dana BOS beban biaya jadi agak murah.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober, Pukul 10.00 WIB)

Ditambahkan juga oleh Ibu Y salah satu walimurid SDN Percobaan 1 Kota

Malang:

“iya mas, saat rapat kenaikan atau pengambilan raport selalu ada penjelasan mengenai penggunaan dana BOS, tapi saya juga tidak begitu paham akan hal tersebut jadi saya cuma mendengarkan dan mengiyakan sajalah.” (Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua walimurid ikut berperan aktif dalam penggunaan dana BOS. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua walimurid paham mengenai dana BOS, padahal kritik dan saran dari masyarakat sangat diperlukan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pelaksanaan dari Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang, dengan melihat dari:**

##### **a. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Sekolah Penerima**

Program dana BOS merupakan salah satu program pemerintah yang mendukung terselenggarakannya wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, dalam penyaluran dana BOS terdapat kelompok atau organisasi yang terkait dalam penyalurannya. Menurut James E. Anderson dalam Islamy (1991:7) bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok perilaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaku kebijakan

disebut sebagai Organisasi Pelaksana BOS yang berasal mulai dari pemerintah pusat sampai pada elemen yang terbawah, yaitu: Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, serta Tim Manajemen BOS Sekolah.

Dengan adanya Organisasi Pelaksana BOS ini setiap Organisasi memiliki tanggungjawab masing-masing, mulai dari Tim Manajemen BOS Sekolah bertanggungjawab kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, lalu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, dan Tim Manajemen BOS Provinsi bertanggungjawab kepada Tim Manajemen BOS Pusat. Adanya tingkatan dari pusat hingga ke sekolah ini menunjukkan adanya struktur organisasi yang hierarkis.

Setelah Tim Organisasi Pelaksana BOS terbentuk, proses selanjutnya mengenai pengalokasian dana BOS. Pengalokasian dana BOS diawali dari tingkat paling bawah yakni dari sekolah dimana sekolah mengisi beberapa formulir untuk diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, diteruskan ke Tim Manajemen BOS Provinsi dan terakhir ke Tim Manajemen BOS Pusat. Untuk jumlah alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Hal ini sebagaimana seperti yang diungkapkan Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (1991:18) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara atau dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras

pemerintahan ataupun berupa program-programa dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **b. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah**

##### **Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang**

Mekanisme pelaksanaan dana BOS oleh sekolah diawali dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dimana hal ini merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan RKAS untuk penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan Buku Petunjuk Penggunaan dana BOS. Dalam Buku Panduan terdapat 13 *point item* yang sudah dijelaskan dalam bab Penyajian data. Pembuatan RKAS ini melibatkan Tim Manajemen BOS sekolah seperti: Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah.

Mekanisme penyaluran dana BOS di Kota Malang disalurkan melalui Bank Jatim dengan waktu penyaluran pencairan dana BOS dilaksanakan dalam 3 bulan sekali tiap tahun. Dengan periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober- Desember. Proses pengambilan dana BOS di SDN Percobaan 1 Kota Malang dilakukan oleh Bendahara sekolah dengan sepengetahuan Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Dalam pengambilan dana ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh Bendahara seperti membawa KTP Asli dan Stemple sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pencairan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN Percobaan 1 Kota Malang, secara garis besar sekolah tersebut telah melaksanakan penggunaan

dana BOS sesuai dengan Buku Petunjuk Penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS oleh sekolah terlihat paling besar digunakan untuk Program Pengembangan Standar Proses dimana program ini mencakup Program Kesiswaan dan Program Ekstrakurikuler.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Petunjuk Penggunaan BOS disebutkan bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

- 1) Disimpan dalam waktu lama dengan maksud dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar; misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
- 4) membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- 5) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 6) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa SSM;
- 7) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 8) Membangun gedung/ruangan baru;
- 9) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 10) Menanamkan saham

- 11) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 13) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisai/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **c. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Setiap dana BOS yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawabannya. Proses pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan melakukan pelaporan yang disusun oleh Bendahara Sekolah sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Lapoaran Keuangan BOS. Pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dibuat setiap triwulan dalam satu tahun dan dikirimkan ke UPT dan semua transaksi yang terjadi harus dicatat dalam buku kas dan disertai dengan bukti kuitansi yang sah.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban juga dalam bentuk monitoring. Bentuk kegiatan monitoring ini adalah melakukan pemantuan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupeten/Kota. Untuk wilayah Kota Malang terutama yang pernah diterjadi di SDN Percobaan 1 Kota

Malang, monitoring berupa sidak yang dilakukan oleh BPK dan KPK dengan mendatangi sekolah dan melihat berkas-berkas. Kegiatan monitoring semacam ini tidak dilakukan kepada semua sekolah melainkan hanya terbatas pada sekolah tertentu saja, sehingga kurang diketahui penerapan program BOS sebenarnya dan dilaksanakan dengan baik dan tertib atau masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Melihat dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring sama halnya dengan evaluasi dimana dalam hal ini memiliki beberapa fungsi, menurut pendapat Guba dan Lincoln dalam Wahab (2001:8) ada lima fungsi penting dari evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi mengemban fungsi pembelajaran artinya dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindari kesalahan yang telah dibuat di masa lalu.
2. Evaluasi sebagai kemudi dan manajemen. Hasil yang diperoleh dari evaluasi akan memberikan umpan balik dan memungkinkan pihak manajemen mengendalikan proyek tetap pada arahnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Evaluasi sebagai fungsi kontrol dan inspeksi, dalam arti bahwa dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak atau negara donor apakah kegiatan yang ditujukan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
4. Evaluasi sebagai fungsi akuntabilitas karena memberikan informasi dan atas dasar informasi itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan pembayar pajak dapat menilai apakah dana yang telah mereka sediakan telah digunakan dengan benar dan demi tujuan yang diharapkan.
5. Evaluasi sebagai fungsi kepenasihatian, dalam hal ini bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak guna mendanai suatu proyek atau proyek-proyek sejenis dimasa yang akan datang.

Dari penjelasan mengenai fungsi-fungsi dilakukannya evaluasi kebijakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki arti penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Terutama dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut bisa lebih meningkatkan nilai efisiensi baik dalam proses perumusannya maupun dalam proses pelaksanaannya sampai pada tingkat akhir (*output-outcome*)

Hal ini sesuai dengan bentuk dari sistem pertanggungjawaban dimana dalam pelaporannya dimulai dari tingkat bawah yaitu sekolah yang akan diteruskan ke Tim Manajem BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya Tim Manajemen

BOS Kabupaten/Kota melakukan pelaporan ke Tim Manajemen BOS Provinsi, dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Manajemen BOS Pusat.

## **2. Evaluasi dengan Melihat Output dan Outcome dari Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upayah Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang**

Dalam setiap kebijakan pada akhirnya akan dilaksanakan yang namanya suatu evaluasi dari kebijakan tersebut. menurut Soeprpto (2002:5) menyatakan bahwa evaluasi harus menfokuskan pada tujuan dan efek yang ditimbulkan dan juga ditambahkan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program juga harus memperhatikan proses dan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Efek dari suatu kebijakan bisa juga berupa hasil keluaran (*Output*) dan timbal balik (*Outcome*) dari kebijakan itu sendiri. Melihat dari hasil penelitian dapat dijelaskan mengenai hasil (*Output*) dari pemberian dana BOS sebagai berikut:

### **a. Output dari Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **1. Meringankan Biaya Operasional Sekolah bagi Sekolah**

Melihat dari tujuan umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dan secara khusus bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Melihat dari hasil penelitian di SDN Percobaan 1 Kota Malang dapat dijelaskan manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sekolah negeri di Kota Malang sudah dapat membebaskan seluruh biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh orangtua murid, akan tetapi tidak serta merta orangtua murid bebas dari segala biaya sekolah. Hal ini mengacu pada aturan mengenai penggunaan dana BOS yang hanya diperuntukan untuk mendanai biaya operasional saja.

Di SDN Percobaan 1 Kota Malang memang membebaskan seluruh biaya operasional sekolah, akan tetapi masalah SPP masih dibebankan kepada Orangtua siswa. Hal ini mengingat bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai SPP, akan tetapi sekolah ini memiliki program dimana besaran jumlah ditentukan sesuai kemampuan orangtua siswa atau disebut dengan SPP progresif dimana yang mampu membantu yang kurang mampu.

## **2. Pengembangan melalui Program Sekolah**

Melihat definisi mutu pendidikan menurut Depdikbud (1996:8) adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah komponen menurut norma atau standar yang berlaku. Melihat juga dari tujuan umum program dana BOS yang bertujuan selain meringankan beban juga menjamin pendidikan dasar yang bermutu maka dalam penggunaannya harus

juga diperuntukan untuk program-program yang bersifat menunjang terciptanya pendidikan yang bermutu.

Melihat hasil penelitian sekolah SDN Percobaan 1 Kota Malang telah menggunakan dana BOS dengan baik melihat sebagian besar dana diperuntukan untuk program-program yang bersifat meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Samiawan dalam Supriadi (2003:572) : peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pendidikan keterampilan dalam segi mental maupun fisik (dexterity) yang berbasis luas, dan meningkatkan mutu pendidikan yang secara lebih khusus berorientasi akademis.

### **3. Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah**

Sarana dan prasarana adalah faktor utama atau dasar dalam menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang baik. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
- b. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan
- c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
- e. Meningkatkan keprofesionalan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan
- f. Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang mendidik

Melihat dari *point-point* diatas terdapat *point* dimana penyediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu startegi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melihat dari besarnya anggaran yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak SDN Percobaan 1 Kota Malang seperti membeli peralatan bahan ajar(kapur tulis, *white board*, peta, penggaris, peralatan keterampilan), perawatan lingkungan sekolah, dan sebagiannya sehingga sekolah tidak perlu lagi memungut iuran dari orangtua murid untuk memenuhi sasaran dan prasarana sekolah. dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekolah guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan sehingga kegiatan belajar mengajar disekolah menjadi lancar.

### **c. Outcome dari Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Program dana BOS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dimana dalam hal ini peningkatakn mutu dapat dilihat pula dari hasil lulusan dan nilai siswa dari tahun ketahun. Menurut pendapat Supriadi (2003:572) menyebutkan bahwa sekolah diharapkan untuk terus meningkatkan mutu lulusannya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal. Melihat pemaparan diatas pihak sekolah telah melakukan kewajibannya dalam meningkatkkan mutu seperti penjelasan *output* diatas.

Dalam perkembangan Lulusan di SDN Percobaan 1 Kota Malang, sebelum adanya dana BOS pada tahun ajaran 2004/2005 menunjukkan tingkat kelulusan siswa mencapai 100%, sedangkan dana BOS mulai berjalan pada tahu 2005.

Melihat data pada tahun digulirkannya dana BOS tingkat lulusan disekolah ini juga tetap stabil dengan kelulusan mencapai 100% dan nilai rata-rata yang baik. selain itu faktor dari asal siswa itu sendiri juga menjadi faktor penting dimana sekolah ini juga berasal dari tingkat kemampuan orangtua yang mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Dengan tingkat kemampuan Orangtua siswa yang cukup baik bisa dikatakan dapat menunjang akan tingkat kemampuan siswa karena orangtua biasanya lebih memperhatikan akan pendidikan anaknya sehingga orangtua juga memberikan pendidikan diluar sekolah seperti les privat atau bimbingan belajar.

Melihat dari hasil penelitian di bab sebelumnya dapat dijelaskan mengenai *Output* dan *Outcome* dari pemberian dana BOS tersebut. hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan evaluasi setelah kebijakan atau dapat juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif. Adapun beberapa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan menurut pendapat Salehudin (2009:5-7) yakni:

1. Pendekatan pertama adalah *objective-oriented approach*.

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan.

2. Pendekatan kedua adalah pendekatan *three-dimensional cube* atau *Hammond's evaluation approach*.

Pendekatan *Hammond* melihat dari tiga dimensi yaitu *instruction* (karakteristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), *institution* (karakteristik individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan *behavioral objective* (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor)

3. Pendekatan ketiga adalah *management-oriented approach*.

Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: context-input-proses-product). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu ditingkatkan

4. Pendekatan keempat adalah *goal-free evaluation*.

Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal.

5. Pendekatan kelima adalah *consumer-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti *software*, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunaannya, atau apakah diperlukan dan

penting untuk program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang dievaluasi di-*follow-up* dan *cost effective*.

6. Pendekatan keenam adalah *expertise-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu program/proyek, karena itu disebut *subjective professional judgement*.

7. Pendekatan ketujuh adalah *adversary-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argumen evaluator mana yang diterima. Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang.

8. Pendekatan terakhir adalah *naturalistic & participatory approach*.

Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para *stakeholder*. Hasil dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai.

Menurut analisa saya sebagai peneliti atau bisa juga dalam hal ini sebagai evaluator, *point* ketiga bisa digunakan dalam mengevaluasi program dana BOS. Pada pendekatan *management oriented approach* ini evaluasi dengan melihat sistem suatu kegiatan. Dalam pendekatan ini program dilihat sebagai suatu sistem dimana apabila dalam program dana BOS ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka bisa dilihat dari proses mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan hingga *output* dan *outcome* dari program dana BOS ini. Dengan pendekatan evaluasi tersebut dapat melihat dari keempat proses tersebut dibagian mana yang mengalami masalah sehingga dapat mengganggu kinerja sistem tersebut.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang**

#### **a. Faktor Pendukung**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat suatu proses kegiatan tersebut. Dalam hal ini proses pelaksanaan program dana BOS juga memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya suatu program agar sesuai dengan tujuannya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Laporan Komisi Nasional Depdiknas tahun 2001, faktor yang mempengaruhi pencapaian mutu pendidikan, yaitu:

- a. Tersediannya guru yang berkualitas dan berkelayakan yang mampu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif dan

mampu pula memanfaatkan fasilitas dan situasi yang ada secara maksimal

- b. Manajemen sekolah dengan pimpinan (Kepala Sekolah) yang mampu mendayagunakan segala potensi yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana fisik serta lingkungan yang diperlukan, termasuk peran serta masyarakat
- c. Manajemen mutu pendidikan. Salah satu penyebab keterpurukan sistem pendidikan kita adalah terjadinya *mismatch* dalam penempatan guru di berbagai jenjang persekolahan. Peran serta masyarakat disamping prakarsa pihak sekolah sendiri dan dukungan pemerintah
- d. Kohesi sosial yang mampu mengakomodasi tumbuh kembangnya aneka ragam budaya dan adat kebiasaan bangsa Indonesia sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan

Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksanakannya program dana BOS ini, seperti kerjasama antara staf guru yang saling membantu dan keadaan sekolah. Melihat hasil wawancara dengan Ibu Sumiyarti selaku Bendahara sekolah dapat dijelaskan bahwa kerjasama antara staf guru sangat membantu dalam terlaksanakannya kelancara mulai dari proses pembuatan RKAS sampai SPJ, walaupun bantuan juga tidak terlalu besar tapi cukup meringankan seperti menyiapkan arsip, perberangkalan, menyimpan kuitansi, dll.

Selain itu keadaan sekolah yang sudah cukup baik juga menjadi pendukung karena alokasi dana BOS tidak terlalu difokuskan untuk biaya perbaikan sekolah

melainkan dialokasikan untuk program-program sekolah yang dapat menunjang dalam meningkatkan mutu siswa dalam tujuan semula dana BOS yang diperuntukan meningkatkan mutu pendidikan.

### **b. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung disisi lain juga terdapat faktor penghambat dimana dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang kurang dan Peranserta walimurid. Melihat dari hasil penelitian masih kurangnya sumber daya aparatur terutama dalam hal administrasi masih menjadi faktor penghambat karena di SDN Percobaan 1 Malang hanya terdapat sedikit staf guru yang mengerti tentang adminstrasi dan pengelolaan dana BOS, bahkan dalam pengurusan dan BOS hanya dilakukan oleh Bendahara sekolah sementara tugas dari bendahara tidak hanya mengurus program dana BOS saja. Dimana hal ini menjadi hambat karena kendala tenaga dan waktu menjadi alasannya karena merangkap dua jabatan maka hal ini menjadi hambatan dalam pembuatan RKAS dan terlebih pembuatan laporan SPJ yang harus dibuat setiap 3 bulan sekali.

Peran serta walimurid atau masyarakat juga menjadi faktor penghambat, dalam pelaksanaannya karena dalam pelaporan kegiatan harus mendapatkan respon atau masukan dari walimurid siswa. Dalam Buku Petunjuk Penggunaan dana BOS juga terdapat *point* dimana peran masyarakat dapat membantu dalam terlaksankannya program ini dengan baik dan transparan.